

Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)

DOI: <https://doi.org/10.35870/jtik.v10i2.5408>

Framing Media Daring dalam Pemberitaan Demonstrasi Penolakan Revisi RUU Pilkada 2024: Analisis pada Tempo.co dan BeritaSatu.com Periode Agustus 2024

Firman Ardiansyah^{1*}, Ahmad Zamzamy²

^{1*,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

article info

Article history:

Received 21 August 2025

Received in revised form

1 September 2025

Accepted 20 September 2025

Available online April 2026.

Keywords:

Framing; Online Media;
Tempo.co; BeritaSatu.com;
Demonstration; 2024 Regional
Head Election Bill; Robert N.
Entman.

Kata Kunci:

Framing; Media Daring;
Tempo.co; BeritaSatu.com;
Demonstrasi; RUU Pilkada
2024; Robert N. Entman.

abstract

This study examines media coverage of demonstrations rejecting the revision of the 2024 Regional Head Election Bill (RUU Pilkada). Two national online media, Tempo.co and BeritaSatu.com, used different framing approaches. The aim is to identify and compare their framing constructions. The method applied was Robert N. Entman's framing analysis with four elements: define problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendations. Data were taken from online news in August 2024. The findings show that Tempo.co emphasized democracy, criticism of the government, and civil society voices, while BeritaSatu.com highlighted political stability, public order, and government responses. These differences demonstrate how editorial orientation shapes media reality and public opinion. Theoretically, this research enriches studies on reality construction in Indonesian mass media. Practically, it encourages readers and policymakers to be more critical of news framing. The novelty lies in revealing contrasting framings between progressive and pro-government media on the 2024 Pilkada, reflecting the tension between democracy and stability.

abstrak

Penelitian ini membahas pemberitaan demonstrasi penolakan revisi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) 2024. Dua media daring nasional, Tempo.co dan BeritaSatu.com, menunjukkan cara framing yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap konstruksi framing kedua media dan membandingkan perbedaan sudut pandangnya. Metode yang digunakan adalah analisis framing Robert N. Entman dengan empat elemen utama: define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendations. Data berasal dari berita daring Agustus 2024. Hasil penelitian menunjukkan Tempo.co lebih menonjolkan nilai demokrasi, kritik terhadap pemerintah, serta dukungan masyarakat sipil. Sebaliknya, BeritaSatu.com lebih menekankan stabilitas politik, ketertiban umum, dan respons pemerintah. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa orientasi redaksional memengaruhi cara media membentuk realitas dan memengaruhi opini publik. Secara teoretis, penelitian ini menambah kajian konstruksi realitas media massa Indonesia. Secara praktis, penelitian ini mendorong pembaca dan pembuat kebijakan untuk lebih kritis terhadap pemberitaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan kontras framing media progresif dan pro-pemerintah dalam isu Pilkada 2024, yang menyoroti tarik-menarik antara demokrasi dan stabilitas.

Corresponding Author. Email: ardianfirman17@gmail.com ^{1}.

1. Pendahuluan

Pada Agustus 2024, sejumlah demonstrasi besar yang menentang revisi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) 2024 menyita perhatian publik di Indonesia. Aksi-aksi ini berlangsung di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, dan melibatkan beragam kelompok, seperti mahasiswa, aktivis, akademisi, dan serikat buruh. Demonstrasi ini dipicu oleh rencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk merevisi dua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 yang mengatur keterlibatan partai nonparlemen dalam pencalonan kepala daerah, serta Putusan No. 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan bahwa batas usia minimal pencalonan kepala daerah dihitung sejak penetapan calon, bukan saat pelantikan (Amrynudin, 2024). Revisi yang diusulkan oleh DPR ini memicu kontroversi di kalangan publik karena dianggap dapat melemahkan esensi putusan MK serta merusak konsistensi demokrasi elektoral Indonesia.

Misalnya, usulan untuk tetap memberlakukan ambang batas pencalonan sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu sebelumnya dianggap membatasi peluang partai kecil atau calon independen untuk berkompetisi secara adil. Di samping itu, perubahan ketentuan batas usia pencalonan juga menjadi perdebatan karena dianggap diskriminatif terhadap calon kepala daerah muda. Protes semakin meningkat ketika DPR terus melanjutkan pembahasan revisi meskipun mendapat penolakan luas, puncaknya pada 22 Agustus 2024 terjadi aksi demonstrasi besar yang kemudian menyebar ke berbagai daerah. Isu yang diangkat dalam demonstrasi ini tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan kebijakan publik. Amnesty International Indonesia (2024) melaporkan bahwa dalam aksi tersebut terdapat puluhan kasus penangkapan, intimidasi, hingga kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap demonstran maupun jurnalis yang meliput peristiwa tersebut. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga mencatat adanya sedikitnya 11 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang meliput aksi ini, yang menandakan bahwa protes

publik telah berkembang menjadi isu yang lebih luas mengenai kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, demonstrasi ini tidak hanya menjadi masalah hukum formal, melainkan juga mencerminkan dinamika politik dan hak asasi manusia di era reformasi. Fenomena ini menjadi bahan pemberitaan yang penting bagi media. Media massa memiliki peran besar dalam membingkai realitas politik dan memengaruhi opini publik. Tempo.co, sebagai salah satu media terkemuka, dikenal dengan gaya pelaporan yang kritis dan independen, yang sering kali menekankan pada prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan suara masyarakat sipil. Sementara itu, BeritaSatu.com lebih memilih pendekatan yang lebih moderat dan pro-pemerintah, dengan fokus pada stabilitas politik, ketertiban umum, dan respons pemerintah terhadap situasi tersebut (Pamungkas & Zamzamy, 2023). Perbedaan dalam konstruksi pemberitaan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas berdasarkan nilai, ideologi, dan orientasi redaksional masing-masing (Berger & Luckmann, 1966).

Dalam perspektif konstruksionis, pemberitaan tidak bisa dianggap sebagai representasi objektif dari realitas, melainkan hasil konstruksi sosial. Jurnalis melakukan seleksi terhadap isu, memilih sudut pandang, serta menentukan narasumber dan diksi yang digunakan. Realitas yang ditampilkan dalam pemberitaan adalah realitas yang sudah dibentuk melalui proses tersebut (Eriyanto, 2002). Konsep ini didukung oleh Robert N. Entman (1993) melalui model analisis framing yang melibatkan empat elemen utama: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberikan penilaian moral, dan memberikan rekomendasi penanganan. Model ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana media membentuk persepsi publik melalui pemilihan isu dan penekanan pada aspek tertentu. Dalam era digital yang semakin berkembang, framing media memiliki pengaruh yang semakin besar. Nielsen melaporkan bahwa konsumsi berita daring meningkat secara signifikan sejak pandemi COVID-19, dengan mayoritas masyarakat Indonesia mengakses berita melalui media daring (Vestergaard *et al.*, 2020). Saputra (2024) menekankan bahwa kecepatan, interaktivitas, dan jangkauan luas media daring menjadikannya alat yang efektif dalam membentuk wacana publik. Oleh

karena itu, perbedaan framing antar media, terutama dalam isu-isu politik yang sensitif seperti revisi RUU Pilkada, memiliki implikasi besar terhadap opini publik dan legitimasi kebijakan pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana Tempo.co dan BeritaSatu.com membingkai pemberitaan tentang demonstrasi penolakan revisi RUU Pilkada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi framing yang digunakan kedua media dan membandingkan konstruksi realitas yang mereka tampilkan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan framing antara media progresif dan media pro-pemerintah, serta implikasinya terhadap pembentukan persepsi publik mengenai isu demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai produk dari konstruksi yang terbentuk melalui interaksi antara individu dan institusi (Candra Wibawa, 2021). Dalam ranah pemberitaan, paradigma ini menekankan bahwa berita bukanlah representasi objektif dari realitas, melainkan hasil dari seleksi dan interpretasi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepentingan, dan orientasi editorial media. Untuk menganalisis konstruksi pemberitaan ini, penelitian ini mengadopsi model analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman, yang terdiri dari empat elemen utama: mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, serta merekomendasikan tindakan. Data dalam penelitian ini terdiri dari teks berita daring yang dipublikasikan oleh Tempo.co dan BeritaSatu.com selama periode 22–30 Agustus 2024, yang mencakup puncak intensitas demonstrasi penolakan terhadap revisi RUU Pilkada. Rentang waktu ini dipilih dengan tujuan untuk menangkap dinamika pemberitaan pada titik kritis peristiwa. Berita-berita tersebut dikumpulkan melalui pencarian di situs resmi kedua media dengan menggunakan kata kunci seperti “demonstrasi RUU Pilkada,” “revisi Pilkada,” dan “aksi mahasiswa Pilkada.” Dari hasil pencarian, sejumlah berita yang relevan terpilih, dan 14 berita kemudian dipilih sebagai sampel penelitian

dengan teknik purposive sampling. Pemilihan berita didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu relevansi substansi dengan isu utama, keterwakilan waktu publikasi dalam periode yang telah ditentukan, keseimbangan jumlah berita yang dimuat oleh masing-masing media untuk memvalidasi perbandingan, serta keutuhan informasi yang menyajikan narasi lengkap, bukan sekadar laporan singkat. Pemilihan 14 berita dilakukan hingga mencapai titik saturasi data, yaitu ketika penambahan berita baru tidak lagi mengungkapkan variasi framing yang berbeda, melainkan hanya menunjukkan pola yang berulang, sehingga dianggap cukup representatif. Selain data primer berupa teks berita, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, serta publikasi lain yang relevan untuk memperkuat analisis (Pratiwi, 2018). Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti melakukan seleksi data dengan menyeleksi berita yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan memilah kutipan atau paragraf penting yang berhubungan langsung dengan isu yang diteliti. Kedua, data yang telah diseleksi dikategorikan berdasarkan empat elemen framing menurut Entman, yaitu: mendefinisikan masalah, menetapkan penyebab, memberikan penilaian moral, serta menyarankan tindakan atau solusi. Tahap ketiga adalah interpretasi data, di mana peneliti membandingkan konstruksi framing yang terdapat dalam kedua media, kemudian mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kecenderungan ideologis yang mendasari pemberitaan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk merumuskan temuan akhir yang secara jelas menjawab fokus penelitian terkait dengan perbedaan framing yang diterapkan oleh Tempo.co dan BeritaSatu.com dalam membingkai demonstrasi penolakan revisi RUU Pilkada 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Framing Media Tempo.co

Analisis terhadap pemberitaan demonstrasi penolakan revisi RUU Pilkada 2024 yang dimuat oleh Tempo.co menunjukkan kecenderungan framing yang kritis, dengan orientasi yang mendukung kepentingan masyarakat sipil. Tempo.co secara konsisten

menggambarkan tindakan legislasi DPR yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pemberitaan tanggal 22 Agustus 2024, media ini menekankan bahwa pengesahan RUU Pilkada oleh Badan Legislasi DPR secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya dalam hal persyaratan pencalonan kepala daerah. Dalam kerangka analisis framing menurut Robert N. Entman, elemen *define problems* dalam pemberitaan Tempo.co menggambarkan situasi ini sebagai konflik besar antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. DPR digambarkan mengabaikan putusan hukum yang sah, dengan tetap mendorong pengesahan aturan yang dipertanyakan tersebut. Selanjutnya, dalam elemen *diagnose causes*, media ini menyoroti DPR sebagai pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik politik, karena tetap melanjutkan pembahasan RUU meskipun ditentang oleh berbagai pihak. Pada elemen *make moral judgement*, Tempo.co menampilkan berbagai opini kritis dari akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat yang menilai tindakan DPR sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Media ini juga memuat suara dari Aliansi Jurnalis Independen serta lembaga sipil lainnya untuk memperkuat penilaian moral terhadap situasi tersebut.

Sementara pada elemen *treatment recommendation*, media ini memberi ruang bagi tokoh masyarakat yang menyerukan perlunya aksi kolektif untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, seperti demonstrasi damai dan desakan terhadap lembaga negara agar bertindak sesuai dengan konstitusi. Beberapa pemberitaan lainnya, termasuk pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengapresiasi demonstrasi sebagai wujud demokrasi, semakin memperkuat narasi bahwa aksi masyarakat merupakan ekspresi politik yang sah. Selain itu, Tempo.co juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran dan jurnalis. Kekerasan, intimidasi, serta pelanggaran hak-hak sipil menjadi fokus yang ditampilkan secara jelas, terutama dalam laporan mengenai tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa Tempo.co membingkai situasi sebagai ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat sipil. Secara keseluruhan, framing yang muncul pada pemberitaan Tempo.co

lebih cenderung mendukung kepentingan masyarakat sipil dan bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya, dalam pemberitaan bertanggal 22 Agustus 2024 dengan judul “RUU Pilkada Dinilai Langgar Putusan MK, Mahasiswa Gelar Aksi di DPR,” Tempo.co menuliskan, “Langkah DPR yang tetap mengesahkan aturan pencalonan kepala daerah jelas bertentangan dengan konstitusi.” Pemilihan diksi “bertentangan dengan konstitusi” menjadi penanda kuat bahwa media ini memposisikan DPR sebagai pihak yang mengabaikan hukum. Dalam elemen *define problems*, Tempo.co membingkai situasi sebagai konflik mendalam antara DPR dan Mahkamah Konstitusi, sementara dalam *diagnose causes*, DPR digambarkan sebagai pihak yang tetap ngotot melanjutkan pembahasan RUU meskipun mendapat penolakan publik. Pada elemen *make moral judgement*, Tempo.co mengutip berbagai pernyataan tokoh kritis. Dalam salah satu laporan, aktivis ICW menyebut, “DPR telah menodai demokrasi dengan mengabaikan keputusan hukum tertinggi.” Tempo.co juga memuat pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menyatakan bahwa demonstrasi adalah “wujud sah ekspresi politik masyarakat.” Narasi seperti ini memperkuat framing bahwa aksi massa merupakan bagian dari perjuangan demokrasi. Pada elemen *treatment recommendation*, Tempo.co memberi ruang bagi tokoh sipil yang menyerukan aksi kolektif, seperti imbauan untuk melanjutkan demonstrasi damai dan mendesak lembaga negara agar konsisten menjalankan putusan MK. Bahkan, Tempo.co menyoroti tindakan represif aparat, seperti dalam berita berjudul “Polisi Halangi Jurnalis Liput Demo Pilkada,” yang menyebut adanya “intimidasi dan kekerasan terhadap mahasiswa dan insan pers.” Ini semakin menegaskan bahwa Tempo.co membingkai relasi kuasa sebagai timpang antara negara dan masyarakat sipil.

Framing Media Beritasatu.com

Berbeda dengan Tempo.co, Beritasatu.com cenderung mengadopsi framing yang lebih netral dan institusional. Dalam pemberitaan pada 22 Agustus 2024, media ini menyoroti bahwa demonstrasi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menampilkan pernyataan resmi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang membantah adanya penangkapan terhadap demonstran. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam elemen *define problems*, Beritasatu.com lebih menekankan kondisi keamanan

yang terkendali, bukan konflik hukum atau pelanggaran konstitusi. Pada elemen *diagnose causes*, Beritasatu.com mengedepankan narasi tentang keberhasilan aparat keamanan dalam mengelola demonstrasi. Media ini menggambarkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari koordinasi yang efektif antara aparat dan pemangku kepentingan, tanpa mengeksplorasi penyebab substantif dari aksi demonstrasi. Dalam elemen *make moral judgement*, Beritasatu.com lebih mengarahkan penilaian moral pada pentingnya menjaga ketertiban umum dan menghindari provokasi. Penilaian terhadap pemerintah dan aparat cenderung diminimalkan. Rekomendasi tindakan atau *treatment recommendation* dalam pemberitaan Beritasatu.com lebih bersifat normatif, dengan imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya pada hoaks dan menjaga suasana tetap damai, tanpa adanya desakan langsung kepada pemerintah atau DPR untuk melakukan perubahan kebijakan. Beritasatu.com membangun framing yang lebih netral dan institusional. Dalam pemberitaan berjudul “Demo Tolak Revisi Pilkada Berlangsung Kondusif” pada 22 Agustus 2024, media ini mengutip pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan, “Tidak ada penangkapan dalam aksi, situasi tetap terkendali.” Pemilihan kata “kondusif” dan “tetap terkendali” menunjukkan bahwa dalam elemen *define problems*, media ini memfokuskan pada keamanan, bukan pada konflik hukum.

Dalam *diagnose causes*, Beritasatu.com menekankan keberhasilan aparat dalam mengamankan situasi, dengan kutipan, “Keberhasilan menjaga keamanan tidak lepas dari koordinasi aparat dengan berbagai pemangku kepentingan.” Pada elemen *make moral judgement*, Beritasatu.com lebih menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari provokasi. Dalam salah satu laporannya, media ini menyebut, “Masyarakat diminta tidak terprovokasi isu-isu liar yang berpotensi memecah belah.” Sementara dalam *treatment recommendation*, media ini mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh hoaks dan menjaga suasana tetap damai, tanpa memberikan desakan konkret terhadap DPR atau pemerintah untuk mengubah kebijakan mereka.

Pembahasan

Perbedaan strategi framing antara Tempo.co dan Beritasatu.com mencerminkan adanya polarisasi dalam pendekatan media dalam menggambarkan peristiwa politik. Tempo.co lebih menonjolkan semangat advokasi dan fungsi kontrol sosial terhadap negara, sejalan dengan peran media sebagai pengawas kekuasaan (Poti, 2020). Sebaliknya, Beritasatu.com memilih pendekatan yang lebih administratif dengan menekankan kestabilan dan ketertiban publik, suatu karakteristik yang umum ditemukan dalam pemberitaan media yang memiliki kedekatan institusional dengan negara (Nur, 2021). Model framing Entman memberikan kerangka yang krusial untuk menganalisis bagaimana media berperan dalam membentuk persepsi publik, terutama melalui penyusunan narasi, pengutipan sumber, dan pemilihan diksi dalam pemberitaan (Krisnanto, 2023). Dengan menggunakan elemen-elemen seperti *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgements*, dan *treatment recommendations*, dapat dilihat bahwa kedua media memaknai demonstrasi dengan cara yang berbeda meskipun membahas peristiwa yang sama. Secara umum, framing yang diterapkan oleh Tempo.co berpotensi menguatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap isu demokrasi dan konstitusi (Rudi, 2024), sementara framing yang disajikan oleh Beritasatu.com lebih mereduksi konflik menjadi isu teknis terkait dengan keamanan publik.

Temuan ini mendukung argumen bahwa media memiliki peran lebih dari sekadar sebagai saluran informasi; media berfungsi juga sebagai agen konstruksi dalam membentuk realitas sosial dan politik (Suhendra Hadiwijaya, 2023). Dalam dinamika politik Indonesia yang terus berkembang, konstruksi media memainkan peran strategis dalam mempengaruhi opini publik serta arah kebijakan negara (Romli, 2018). Perbandingan framing ini menunjukkan bahwa Tempo.co memposisikan dirinya sebagai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap negara dengan menyoroti pelanggaran konstitusi, ketidakadilan, dan represi aparat. Di sisi lain, Beritasatu.com lebih berfokus pada stabilitas politik dan keberhasilan aparat, dengan menekankan narasi yang menggambarkan situasi sebagai “kondusif” dan “terkendali.” Temuan ini semakin memperkuat teori framing Entman (1993), yang menyatakan bahwa media tidak hanya

menyajikan fakta, tetapi juga menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh publik melalui pemilihan diksi, sumber, dan sudut pandang pemberitaan. Implikasinya, framing yang diterapkan oleh Tempo.co dapat berpotensi meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap isu demokrasi dan konstitusi, sedangkan framing oleh Beritasatu.com lebih cenderung mereduksi konflik menjadi isu teknis keamanan semata. Temuan ini menegaskan bahwa media bukan hanya sekadar saluran informasi, melainkan juga agen yang memengaruhi konstruksi realitas sosial-politik yang dapat menentukan arah opini publik dan kebijakan negara di Indonesia.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menganalisis framing pemberitaan Tempo.co dan BeritaSatu.com terkait demonstrasi penolakan revisi RUU Pilkada 2024 dengan menggunakan model framing Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media membingkai peristiwa yang sama dengan pendekatan yang berbeda. Tempo.co lebih menekankan demonstrasi sebagai ekspresi sah masyarakat sipil dalam memperjuangkan demokrasi, dengan fokus pada suara mahasiswa, aktivis, dan tokoh masyarakat. Sebaliknya, BeritaSatu.com lebih menyoroti stabilitas dan keamanan, dengan menekankan narasi keberhasilan aparat dalam menjaga ketertiban serta mengurangi kritik terhadap DPR dan pemerintah.

Perbedaan framing ini mengonfirmasi bahwa media tidak hanya menyajikan informasi, melainkan juga membentuk realitas sosial-politik yang mencerminkan kepentingan dan orientasi editorial mereka. Oleh karena itu, media memiliki peran strategis dalam memengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu demokrasi dan dinamika politik nasional. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar industri media di Indonesia lebih menegakkan prinsip keberimbangan, menghindari dominasi perspektif negara, dan memberikan ruang yang proporsional bagi suara masyarakat sipil. Langkah ini penting untuk menjaga independensi media sebagai pilar demokrasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melibatkan lebih banyak media

atau menerapkan analisis resepsi khalayak guna memahami sejauh mana konstruksi media memengaruhi opini publik.

5. Daftar Pustaka

- Alhamid, M., & Kambo, G. A. (2021). Pembatalan pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan keterkaitannya pada pemilihan umum tahun 2024. *Pleno Jure*, 10(1), 521910. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.560>.
- Anindyajati, T. (2023). Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 28-37.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- CANDRA WIBAWA, R. C. (2021). *PEMBINGKALAN BERITA DEMONSTRASI PENOLAKAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA (Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Online Tempo. co dan Republika. co. id Periode Oktober 2020)* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jatim).
- KRISNANTO, T., & Fathan, F. (2023). *ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DEMONSTRASI MAHASISWA SURAKARTA TERKAIT DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI SOLOPOS. COM* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Nur, E. (2021). Peran media massa dalam menghadapi serbuan media online. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(1).
- Nur, E. (2021). Peran media massa dalam menghadapi serbuan media online. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(1).

- Pamungkas, G., & Zamzamy, A. (2023). Analisis framing komparasi negosiasi penyanderaan pilot Susi Air pada media Kompas.Com dan Suara Papua. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9), 4175–4180. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i9.2023.4175-4180>.
- Poti, J. (2020). Ekonomi politik, media dan ruang publik. *Semiotika: Jurnal Komunikasi*, 13(2). <https://doi.org/10.30813/s.jk.v13i2.1945.g1587>
- Rajab, A. (2018). Urgensi Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3(2), 177-189.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik online: Panduan mengelola media online*. Nuansa Cendekia.
- Rudi, V. (2024). *Tinjauan kritis atas aksi demonstrasi dalam sistem demokrasi di Indonesia*.
- Saputra, A. D. (2024). Analisis framing dalam pemberitaan demonstrasi 11 April 2022 pada media online Kompas.Com.
- Suhendra Hadiwijaya, A. (2023). Sintesa teori konstruksi sosial realitas dan konstruksi sosial media massa. *Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 11(1).
- Vestergaard, L. S., Nielsen, J., Richter, L., Schmid, D., Bustos, N., Braeye, T., ... & Adlhoch, C. (2020). Excess all-cause mortality during the COVID-19 pandemic in Europe—preliminary pooled estimates from the EuroMOMO network, March to April 2020. *Eurosurveillance*, 25(26), 2001214.